
Peran Dinas Pariwisata Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dwijyantyo Ogelang¹
Ismail Rachman²
Fanley N. Pangemanan³

ABSTRAK

Pariwisata menjadi salah satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Bersama dengan industri teknologi dan informasi, industri pariwisata diperkirakan menjadi penggerak utama perekonomian di abad ini. Perkembangan pariwisata Indonesia tak terlepas dari perkembangan pariwisata dunia. Dengan semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kepentingan masyarakat setempat, maka dalam rangka percepatan proses pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Daerah harus benar-benar menangkap pelimpahan tugas dan wewenang itu sebagai salah satu peluang yang menjadi andalan untuk memperoleh PAD dan memajukan masyarakat di daerah. Penelitian ini berlokasi di Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Daerah dalam mengelola sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dari Midedleton (dalam Yoeti 2012:4) yaitu pengembangan amenities yang meliputi aspek - aspek: Akses Destinasi Wisata; Fasilitas Destinasi Wisata; Daya Tarik Wisata. Dari hasil penelitian didapati Peran Dinas Pariwisata Daerah dalam mengelola sektor pariwisata belum mampu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pada aspek pengembangan Amenitas, sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki daya tarik tersendiri, namun fasilitas, dan akses yang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Peran, Dinas, Pengelolaan, Sektor Pariwisata

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tentang Pembangunan Kepariwisataan (Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata, Pasal 8: 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi wisata sebagai daerah kepulauan dimulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata agro tentu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sangihe. Selain di topang oleh keberagaman objek wisata juga memiliki keberagaman budaya, perbedaan budaya dan adat istiadat masyarakat pada setiap objek wisata tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Sangihe. Namun sayangnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum maksimal, dimana masih terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan

wisatawan (Wisman) pada tahun 2019 sebesar 2.188 wisman, tahun 2018 sebanyak 2.537 wisman, dan tahun 2017 sebanyak 2.699 wisman, hal ini juga mengindikasikan bahwa pariwisata bukanlah menjadi program prioritas unggulan dari Pemerintah Kabupaten Sangihe, mengingat masih belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata, sehingga sarana dan prasarana penunjang pariwisata belum dikelola dengan baik.

Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan beberapa langkah strategi mengelola dan pengembangan sektor pariwisata, antara lain dengan melakukan studi analisis pasar pariwisata, merumuskan strategi pemasaran dan promosi pariwisata bekerjasama dengan biro– biro perjalanan, melaksanakan even–even dan hiburan di lokasi wisata potensial, dan melakukan promosi pariwisata pada even besar seperti Pameran Pembangunan Provinsi Sulut, namun sayangnya kegiatan-kegiatan ini tidak dilakukan secara terus menerus, begitu juga roadmap pengelolaan pariwisata unggulan belum di petakan secara optimal oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya melalui instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata Daerah.

Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, baik secara fisik, sosial, budaya dan ekonomi, jika pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata setiap tahunnya. Namun pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan sesuai dengan

perencanaan pengembangannya, penurunan jumlah kunjungan wisatawan masih terjadi. Penurunan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe erat kaitannya dengan belum memadainya sarana dan prasana wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti minimnya akses wisata, terbengkalainya infrastruktur wisata, dan minimnya atraksi budaya, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Sehingga sebagian besar masyarakat Kepulauan Sangihe memilih untuk mengalihkan tujuan wisatanya pada objek wisata daerah lain, dari pada berwisata di objek wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tinjauan Pustaka

Konsep Peran

Menurut Poerwadarmita (dalam Solihin, 2010:12), Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif. Syahril Syarbaini mengatakan bahwa peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yakni pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kedudukan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Dalam hal ini seseorang akan bersikap menurut aturan main dan nilai-nilai yang dijunjung.

Menurut J. Dwi Narwoko (dalam Solihin, 2010:16) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai - nilai, norma - norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Konsep Pariwisata

Istilah kepariwisataan berasal dari kata wisata. Organisasi pariwisata dunia, mendefinisikan pariwisata sebagai aktifitas perjalanan dan tinggal seorang diluar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja ditempat yang dikunjungi tersebut.

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang dalam melakukan perjalanan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk menikmati perjalanan dengan keinginan yangberanekaragam yang menimbulkan pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan.

Didalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan untuk tujuan wisata seperti berkreasi, berbisnis, maupun untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan khusus yang lain disebut sebagai wisatawan (tourist).

Konsep Pengelolaan

Dalam bahasa Inggris pengelolaan adalah management yang artinya pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan pengemudian. Pengelolaan (manajemen), menurut Leiper (dalam Ni Luh Gede, 2017:80), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang

melekat pada peran tersebut. Fungsi - fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Planning (perencanaan)
2. Directing (mengarahkan)
3. Organizing (termasuk coordinating)
4. Controlling (pengawasan)

Menurut Terry pengelolaan (managemen) adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber - sumber lainnya.

Ismail Solihin mengatakan bahwa Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses. Artinya, seluruh kegiatan manajemen yang dijabarkan Peran Dinas Pariwisata Daerah dalam pengelolaan kedalam empat fungsi manajemen dilakukan secara berkesinambungan dan semuanya bermuara kepada pencapaian tujuan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini di fokuskan pada pengelolaan sektor wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti yang dikemukakan oleh Midedleton (dalam Yoeti 2012:4) yaitu pengembangan amenities yang meliputi aspek - aspek:

1. Akses Destinasi Wisata
2. Fasilitas Destinasi Wisata
3. Daya Tarik Wisata

Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Pariwisata Daerah
- Kepala Bidang Pemasaran
- Kepala Bidang Destinasi dan Industri

Pariwisata

- Wisatawan atau pengunjung (2 Orang)
- Masyarakat (1 Orang)

Sumber data terdiri dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian (organisasi), dengan cara:
 - a. Wawancara
 - b. Observasi

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan berdasarkan acuan materi atau literatur dan review terhadap dokumen, buku, bahan bacaan, laporan, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti pada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pembahasan

Pengembangan Amenitas

Pengembangan amenities merupakan kunci dalam keberhasilan suatu objek pariwisata, dimana secara keseluruhan kebutuhan wisatawan sangat erat dengan kualitas dan kuantitas pengembangan amenities, dan di era globalisasi ini wisatawan tentu lebih memilih objek wisata yang memiliki daya tarik, fasilitas, dan akses yang lebih baik, sehingga para instansi/organisasi yang bergerak pada bidang pariwisata harus meningkatkan kualitas produk dari objek wisatanya. Pengembangan Amenitas dalam pengertian Victor T.C Middleton, terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu, pertama, akses destinasi wisata, kedua, fasilitas destinasi wisata, dan ketiga, daya tarik wisata.

a. *Accessibilities Of The Tourist Destination (Akses Destinasi Wisata)*

Pengembangan dalam ruang lingkup akses destinasi wisata merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan suatu destinasi wisata, dalam hal ini ialah objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Dinas Pariwisata Daerah, pengembangan dalam hal akses destinasi wisata terbagi dalam 4 bagian yaitu, Infrastruktur, Transportasi, Kebijakan Pemerintah, dan Prosedur

Operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Daerah bahwa masalah Infrastruktur, Transportasi, kebijakan (transportasi, visa), Operasional (kebijakan tarif, frekuensi layanan) masih perlu dioptimalkan lagi.

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dibahas sebagai berikut:

Pertama, infrastruktur dalam hal ini Terminal Bus, ketersediaan terminal bus memang benar ada dan lokasinya tidak strategis dari objek wisata, untuk mengatasi persoalan jarak antara objek wisata dengan terminal, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe membangun Rest Area (Tempat Beristirahat) yang terletak sekitar 500 meter dari objek wisata, namun berdasarkan observasi peneliti keberadaan rest area tersebut tidak beroperasi dengan baik, pintu masuk lokasi yang tertutup dan tidak adanya aktivitas didalamnya, sehingga keberadaan rest area ini tidak terlalu mendukung aktivitas wisatawan pada objek wisata.

Kedua, transportasi umum, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang berasal dari Dinas Pariwisata Daerah, keberadaan transportasi pada objek wisata baik yang menuju ataupun yang melewati objek wisata sudah lancar dan beragam, dan berdasarkan observasi peneliti dilapangan dan hasil wawancara peneliti dengan wisatawan, bahwa intensitas transportasi umum yang menuju ataupun melewati objek wisata belum cukup memadai, dimana ketersediaan transportasi pada objek wisata terbagi dalam transportasi lintas daerah, dan angkutan umum yang rentang waktu melewati objek wisata belum normal, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 20 - 30 menit dalam mendapatkan transportasi, dan dalam satu kedatangan bus/angkutan kota wisatawan belum tentu dapat ikut dalam perjalanan menuju tempat lainnya.

Ketiga, kebijakan pemerintah mengenai transportasi, berdasarkan

temuan peneliti dalam penelitian pada dinas dan objek wisata, bahwa kebijakan pemerintah dalam hal transportasi seperti yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya bahwa kebijakan transportasi ada, namun persoalan transportasi umum pada objek wisata ialah intensitas transportasi yang masih rendah.

Keempat, kebijakan pemerintah mengenai tarif dan frekuensi layanan objek wisata, dalam hal ini pemerintah menyerahkan wewenang pengenaan tarif dan layanan pada masing-masing pengusaha rental mobil, berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan wisatawan, bahwa dalam tarif tidak ada persoalan, namun frekuensi layanan terdapat keluhan dari wisatawan, dimana minimnya *tourguide* atau pemandu wisata.

b. Facilities of the tourist destination (Fasilitas Destinasi Wisata)

Pengembangan dalam ruang lingkup fasilitas destinasi wisata merupakan satu bagian penting dalam pengembangan amenities, fasilitas destinasi wisata mencakup Unit Akomodasi (penginapan), Restoran (kualitas makanan dan minuman), Transportasi dari Destinasi, Olahraga dan Aktivitas (memancing, berburu), Toko Retail (agen travel lokal), pelayanan lain (pusat informasi, polisi), fasilitas lain (suvenir, seni). Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dan observasi langsung bahwa:

Pertama, unit akomodasi (penginapan), berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang telah ditentukan dan observasi dilapangan, belum tersedia fasilitas berupa penginapan (hotel, motel, villa) pada objek wisata yang ada, tempat penginapan hanya tersedia di pusat kota yaitu di Tahuna sebagai Ibukota Kabupaten namun pada saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pariwisata Daerah sedang melakukan pengkajian dengan pendekatan *homestay*, menurut keterangan dari Kepala Seksi Pengembangan Jasa ketidakterediaan

penginapan ini disebabkan oleh keterbatasan pelanggan dan juga tidak adanya investor.

Kedua, Restoran, Cafe dan Bar (kualitas makanan dan minuman), berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang telah ditentukan dan observasi dilapangan, belum tersedia restoran, cafe dan bar pada objek wisata, ketidaktersediaan fasilitas tersebut tentu mempengaruhi kepuasan wisatawan yang berkunjung pada objek wisata dan kesinambungan kunjungan wisatawan kedepannya.

Ketiga, transportasi dari destinasi dan toko retail, berdasarkan wawancara dengan informan dan temuan peneliti dilapangan, telah tersedia transportasi dari destinasi berupa kerjasama dengan travel rakyat yang ada, namun tidak optimal karena masih sedikitnya pengunjung atau wisatawan, ketidaktersediaan ini tentu berdampak pada jumlah kunjungan wisata, dimana para wisatawan tentu lebih memilih untuk berkunjung pada objek wisata yang mudah transportasi wisatanya. Minimnya layanan fasilitas dalam hal Toko Retail pada objek wisata.

Keempat, pelayanan lain dan fasilitas lain, berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan temuan peneliti dilapangan, pelayanan lain berupa pusat informasi wisata dan kantor polisi tersedia pada objek wisata, namun ada permasalahan dimana kurangnya tenaga kerja ataupun petugas yang berjaga, sehingga pada hari besar dimana terdapat peningkatan kunjungan, wisatawan yang berkunjung merasa tidak puas disebabkan minimnya petugas yang dapat menginformasikan ataupun mendeskripsikan sejarah, fungsi bangunan, kebudayaan masyarakat pada objek wisata. Fasilitas lain yang terdapat pada objek wisata yaitu pusat penjualan souvenir dan seni, namun pada masa penelitian yang dilakukan peneliti fasilitas ini sedang dalam tahap pembangunan (pusat penjualan souvenir) dan renovasi (panggung kesenian), namun berdasarkan Undang - Undang

Nomor 10 Tahun 2009 pembangunan fasilitas ini haruslah berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat.

c. Daya Tarik Wisata

Pengembangan dalam ruang lingkup daya tarik wisata merupakan bagian ketiga dari pengembangan amenities yang dikemukakan Middleton, daya tarik wisata dalam hal ini mencakup daya tarik alam, daya tarik budaya, daya tarik sosial, dan daya tarik buatan, daya tarik wisata juga merupakan faktor yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung pada objek wisata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan data oleh peneliti dilapangan, objek wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Daerah, dapatlah dikatakan sebagai objek wisata yang kompleks dalam hal daya tarik wisata, dimana objek wisata pantai ini memiliki daya tarik alam berupa pemandangan alam yang indah.

d. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat tentu berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produk wisata, dan dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan pada suatu objek wisata, berdasarkan hasil wawancara, observasi dan temuan peneliti dilapangan, pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, pembuatan souvenir dan penjualannya.

Namun menurut informasi yang peneliti peroleh, pengembangan/ pemberdayaan masyarakat sudah lama tidak berjalan lagi, berdasarkan temuan tersebut, menurut peneliti bahwa program pengembangan masyarakat pada objek wisata tidak berjalan, padahal jika mengacu pada Misi Dinas Pariwisata Daerah yang Ketiga yaitu "Mewujudkan citra budaya dan pariwisata Kepulauan Sangihe sebagai salah satu sektor andalan penghasil devisa negara, wahana pemberdayaan ekonomi rakyat, sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan serta penciptaan

kesempatan berusaha dan bekerja”, sudah seharusnya Dinas Pariwisata Daerah merumuskan program pengembangan masyarakat, bukan hanya sebatas pemberdayaan pada kesenian masyarakat, namun pada pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, sehingga tercapainya penciptaan kesempatan berusaha dan bekerja di masyarakat.

Fanley Pangemanan (2020:5) mengungkapkan tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka, oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya.

Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan. Sebagai salah satu daerah kepulauan tempat terhimpunnya 105 buah pulau besar dan kecil, daerah perbatasan tersebut layak menjadi salah satu kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Utara. Beragam objek dan daya Tarik wisata bagi wisatawan mancanegara maupun domestik dapat di tawarkan untuk berkunjung ke Kabupaten yang memiliki luas daratan 736,97 Km² dan luas lautan 11.126,61 Km². Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek dan daya tarik wisata antara lain objek wisata budaya, objek wisata bahari dan objek wisata alam. Sejumlah pesona wisata menarik dimiliki di antaranya Gunung Api Bawah Laut di Pulau Mahangetang, ini adalah salah satu objek yang langka dan merupakan keajaiban dunia. Objek wisata alam yang terletak sekitar 18 mil dari kota Tahuna, dapat ditempuh dengan perahu sekitar dua jam dari ibukota Sangihe itu memiliki daya Tarik tersendiri. Pesona wisata dimiliki objek wisata itu sangat menarik, sebab gunung api di bawah laut hanya

satu - satunya di Indonesia. Wisatawan juga dapat melihat wisata budaya seperti Makam Raja Santiago, Rumah Raja Mocodompis dan objek wisata lainnya adalah Pulau Mendaku, keindahan laut Pulau Mendaku ini memiliki berbagai jenis terumbu karang dan ikan berwarna warni dengan pantainya yang berpasir putih. berbagai macam objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sangihe mempunyai potensi yang cukup baik yang dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah. Berbagai macam objek wisata tersebut menawarkan berbagai macam pesona yang dimiliki masing - masing objek wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun sangat disayangkan tetapi sebagian besar objek wisatanya tidak di kembangkan padahal masih banyak objek wisata yang masih layak untuk di kembangkan dan di lestarikan. Beberapa objek wisata yang potensial dan menjanjikan ini masih belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga belum dapat menarik sebanyak - banyaknya turis asing maupun domestik untuk berkunjung ke daerah itu. Salah satu objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah objek wisata alam Pulau Mendaku.

Pulau Mendaku adalah salah satu dari beberapa objek wisata alam yang ada di Kabupaten Sangihe. Objek wisata ini berada di Kecamatan Manganitu Selatan. Namun salah satu objek wisata ini dalam perkembangannya masih belum optimal. Masih banyak kekurangan dan kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti kurangnya alat transportasi menuju pulau mendaku ini, sehingga minimnya wisatawan yang datang berkunjung ketempat wisata tersebut. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengembangannya yaitu masih kurangnya modal atau biaya dalam rangka pengembangan pariwisata. Tidak mengherankan jika sarana dan prasarana penunjang di

lokasi wisata itu sangat memprihatinkan dan juga kurangnya sumber daya manusia. Peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan pulau mendaku ini masih tidak dilakukan secara total.

Peran Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Peranan dinas pariwisata daerah dalam pengelolaan sektor wisata berdasarkan selain dari aspek amenities, dapat juga ditelaah sebagai peran koordinator, fasilitator dan stimulator. Peran dinas sebagai Koordinator yang dimaksud adalah mengatur dan membuat konsep dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengelola dan mengembangkan objek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata, agar semakin dikenal dan diketahui oleh publik. Promosi dan pemasaran yang dilakukan dapat melalui media elektronik yang bisa diakses dengan jaringan internet seperti website yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun oleh Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pemerintah juga menambahkan promosi melalui pembuatan brosur, media cetak atau surat kabar apabila ada event - event atau festival yang akan digelar, bukan hanya even skala lokal, tetapi juga dalam event nasional bahkan internasional.

Fanley Pangemanan (2020:6) mengungkapkan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan sejatinya melalui pembangunan objek dan daya tarik, baik dalam bentuk mengusahakan objek wisata yang sudah ada maupun membuat objek - objek baru sebagai objek dan daya tarik. Daerah wisata harus memiliki daya tarik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berusaha tentang mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengikuti

beberapa event, pameran, membuat dan menyebarkan brosur hal itu dilakukan karena banyak orang tahu potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan, namun sejauh ini Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan promosi dan pemasaran pariwisata ada beberapa hal penting salah satunya kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata Daerah di dalam internet dan masih belum ada website khusus dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga wisatawan kurang mengenal potensi wisata apa saja yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selain peran dari pemerintah daerah diperlukan juga peran dari masyarakat setempat terhadap pengembangan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai daerah mereka yang memiliki potensi wisata. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang yang tahu tentang potensi objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun pada kenyataannya masyarakat belum mampu mengartikan pengembangan suatu destinasi wisata.

Kemudian peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Daerah) sebagai fasilitator, disini Dinas Pariwisata Daerah berperan untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta fasilitas dalam pengembangan objek wisata. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana telah didukung dengan berbagai penginapan, rumah makan, serta transportasi. Namun pembangunan sarana dan prasarana hanya ada di beberapa kawasan wisata saja dan itupun hanya terbatas karena dana yang masih belum mencukupi. Padahal sarana, prasarana dan infrastruktur adalah salah satu bergerak tidaknya semua sektor perekonomian termasuk sektor pariwisata dari kelemahan tersebut pada akhirnya.

Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe di sesuaikan dengan sifat geografis karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Oleh karena itu pengelolaan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe berfokus pada objek wisata bahari. Dengan beragam destinasi yang sangat menarik, unik, spesifik dan langka, sektor pariwisata khususnya pariwisata bahari diharapkan dapat menjadi salah satu kontributor penting pengembangan ekonomi masyarakat di daerah ini. Potensi obyek pariwisata di daerah ini dengan beragam destinasi unggulan yang spesifik, langka, keajaiban dunia yang menakjubkan. Beragam jenis obyek wisata utamanya bahari, dirgantara, adventure, budaya, religi, sejarah, kuliner dan sebagainya tersedia dan memiliki prospek untuk dikembangkan. Namun dalam pengelolaan pariwisata ini banyak melibatkan pemerintah desa dan juga masyarakat setempat padahal ini merupakan tanggungjawab penuh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan mempercepat pengembangan objek wisata. Berikut ini beberapa strategi dan upaya yang dilakukan oleh dinas pariwisata dalam pengelolaan objek dan daya tarik wisata :

1. Penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Dinas Pariwisata Daerah) melakukan kerja sama antara instansi pemerintah.
3. Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dalam mengelolah objekwisata.

Penutup

Kesimpulan

1. Peran Dinas Pariwisata Daerah dalam mengelola sektor pariwisata belum mampu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat rendah

2. Pada aspek pengembangan Amenitas, sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki daya tarik tersendiri, namun fasilitas, dan akses yang perlu ditingkatkan, begitu pula dengan stakeholder pariwisata yang belum terintegrasi dalam pengembangan amenitas tersebut, yang dapat di simpulkan dari beberapa aspek:

- a. Akses Destinasi Wisata, sarana prasarana dan infrastruktur pariwisata yang belum optimal perlu ditingkatkan, begitu pula dengan layanan jasa dan penunjang pariwisata yang masih minim di lokasi objek wisata yang ada di Pantai Panuaeng dan objek wisata lainnya.
- b. Fasilitas Destinasi Wisata, meliputi pengembangan fasilitas destinasi wisata yaitu akomodasi, restoran/bar/cafe, transportasi daridestnasi (taxi, mobil rental, bus pemandu wisata), olahraga dan aktivitas (golf, memancing berburu), retail outlets (agen travel lokal, toko obat), pelayanan lainnya (pusat informasi wisata, kantor polisi), fasilitas lainnya (suvenir, seni) masih belum tersedia secara berkesinambungan di kawasan pariwisataKabupaten Sangihe.
- c. Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sangihe khususnya wisata alam sangat menunjang, namun pengembangan daya tarik budaya, daya tarik sosial, dan daya tarik buatan belum dikembangkan secara optimal.
- d. Pengembangan Masyarakat, agar dapat menunjang kepariwisataan belum dilakukan dengan baik seperti memberikan edukasi, dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung mewarnai produk pariwisata

Saran

1. Dinas Pariwisata Daerah harus

melahirkan program kerja yang sesuai dengan Visi dan Misi khususnya dalam mengelola objek wisata yang ada, serta mengintensifkan program - program lainnya yang dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Memaksimalkan pengembangan amenities dalam hal ini akses destinasi wisata, fasilitas destinasi wisata, dan daya tarik wisata, sehingga dapat memenuhi kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya, dan meningkatkan kunjungan wisatawan dan pemerintah daerah dapat mengembangkan objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menjalin kerja sama yang baik dengan pihak swasta agar dapat membantu dalam mengembangkan objek wisata

Daftar Pustaka

- I Putu Hardani Hesti Duari, Apriyanti Tarwiyah. 2019. Pemanduan Perjalanan Wisata (Bidang Keahlian: Pariwisata). Jakarta: Andi
- Iwan Nugroho. 2010. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta: Pustaka Pelajar
- Muljadi, Andri Warman. 2014. Kepariwisata dan Perjalanan. Jakarta: Rajawali Pers
- Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Gede Adi Yuniarta, I Gusti Ayu Purnamawati. 2017. Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers
- Oka. A. Yoeti. 2010. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Pangemanan, Fanley dkk. 2020. Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan : Jurnal Eksekutif.
- Paat, A. J., Mantiri, M., & Pangemanan, F. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Pelestarian Budaya Minahasa Anak Suku Tontemboan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Di Dinas

Kebudayaan Dan Pariwisata).
Jurnal Eksekutif, 1(4).

- Pendit, Nyoman S. 2008. Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: PT Pradnya
- Pardede, Pontas M. 2011. Manajemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S 2002. Teori peranan. Jakarta ; PT. Bumi Aksar
- Solihin, Ismail. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Bambang. 2012. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Gava Media
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA.
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia : Dari teori ke praktik. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- T. C. Middleton dalam Oka. A. Yoeti. MBA. 2012. Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Jakarta. Pradnya Paramitha

Sumber lainnya

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah